

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI SMP

NEGERI 13 SURABAYA

Tri Wahyuningtias¹, Mufarrihul Hazin²

¹ Universitas Negeri Surabaya; tri.22058@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; mufarrihulhazin@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan;
Makan bergizi gratis;
SMPN 13 Surabaya

Riwayat artikel:

Diterima 2026-02-02

Direvisi 2026-02-05

Diterima 2026-02-10

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik serta mendukung konsentrasi belajar di sekolah. SMPN 13 Surabaya menjadi salah satu sekolah pelaksana program MBG yang menarik untuk dikaji karena ditetapkan sebagai sekolah percontohan dalam implementasi awal kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik. Aspek komunikasi dinilai cukup efektif melalui koordinasi antara sekolah dan penyedia program serta pemanfaatan media komunikasi seperti grup WhatsApp. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung relatif memadai meskipun belum didukung oleh anggaran operasional khusus. Sikap pelaksana menunjukkan komitmen dan dukungan yang tinggi terhadap program, baik dari pihak sekolah maupun guru. Sementara itu, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memberikan dukungan positif, terlihat dari antusiasme siswa, dukungan orang tua, serta penerimaan lingkungan sekitar sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antar komponen pelaksana yang partisipatif dan responsif terhadap tantangan.

Penulis yang sesuai:

Tri Wahyuningtias

Universitas Negeri Surabaya; tri.22058@mhs.unesa.ac.id

1. PERKENALAN

Pendidikan merupakan proses holistik yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan akademik, tetapi juga bertujuan membentuk individu secara utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, fisik, dan sosial. Dalam kerangka ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembelajaran kurikuler, melainkan sebagai ruang strategi untuk pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Salah satu prasyarat penting bagi tercapainya proses pendidikan adalah terpenuhinya kesehatan dan gizi siswa, karena kecukupan gizi berpengaruh langsung terhadap kemampuan konsentrasi, daya pikir, stamina, dan ketahanan belajar siswa. Tanpa dukungan gizi yang memadai, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan berisiko tidak mencapai hasil yang optimal (UNESCO, 2021). Prinsip keadilan dan kesetaraan akses pendidikan juga menuntut negara dan sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak, tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan. Namun, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering menghadapi tantangan ganda, yakni keterbatasan akses sumber belajar dan permasalahan kronis gizi yang berdampak pada perkembangan kognitif dan prestasi akademik. Kondisi ini berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi jika tidak ditangani secara sistematis (Darlan & Wahidin, 2024).

Di Indonesia, persoalan gizi anak masih menjadi isu serius. Data kesehatan menunjukkan bahwa stunting, anemia, dan defisiensi mikronutrien masih banyak ditemukan, termasuk pada anak usia sekolah. Pola konsumsi makanan tidak sehat, pembatasan akses pangan bergizi, serta kondisi lingkungan perkotaan yang padat semakin memperparah situasi tersebut. Dampak jangka pendek dan panjang dari malnutrisi mencakup penurunan konsentrasi belajar, prestasi akademik yang rendah, meningkatnya ketidakhadiran siswa, hingga rendahnya produktivitas di masa depan (Rezkiyanti, 2021). Sebagai respons atas permasalahan tersebut, kebijakan makan bergizi di sekolah dipandang sebagai solusi strategis dan komprehensif. Berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil telah membuktikan bahwa program makan di sekolah mampu meningkatkan status gizi, kehadiran, serta prestasi belajar siswa, sekaligus menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini dan mendukung ekonomi (Palupi, Rachmawati, & Prawiningdyah, 2020). Di Indonesia, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai program prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan didukung pembentukan Badan Gizi Nasional, dengan sasaran peserta didik serta kelompok rentan lainnya.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan MBG di berbagai daerah menunjukkan beragam tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya komunikasi dan koordinasi antaraktor pelaksana, keterbatasan sumber daya, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga resistensi sosial dan dinamika kepentingan lokal. Beberapa kasus menunjukkan penolakan masyarakat, keterlambatan pencairan anggaran, lemahnya tata kelola, serta kekhawatiran pelaku usaha kantin sekolah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan desain, tetapi juga oleh kualitas implementasinya, sebagaimana ditekankan dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Di Kota Surabaya, kebijakan Makan Bergizi Gratis belum diterapkan secara merata, melainkan masih terbatas pada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan, salah satunya SMPN 13 Surabaya. Sekolah ini menjadi menarik untuk dikaji karena telah menjalankan program MBG dengan tingkat penerimaan dan dukungan yang relatif tinggi dari pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Selain itu, sebagai program baru, MBG masih memerlukan pembelajaran empiris terkait dinamika pelaksanaan, kendala, serta strategi pemecahan masalah di tingkat sekolah. (Wang, Shinde, Young, & Fawzi, 2021)

Di tingkat sekolah, berbagai permasalahan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis masih sering ditemukan. Kendala utama yang muncul meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan,

maupun pihak sekolah. Di lingkungan sekolah sendiri, keterbatasan pemahaman teknis, pembagian peran yang belum optimal, serta perbedaan persepsi antar unsur sekolah berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, partisipasi orang tua dan komite sekolah yang belum merata dapat menjadi hambatan dalam menjaga kemiskinan dan kebijakan penerimaan di tingkat akar rumput. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Makan Bergizi Gratis di sekolah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan makanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, koordinasi, sumber daya, serta sikap pelaksana. Tanpa implementasi pengelolaan yang baik, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kualitas pembelajaran siswa berpotensi berada di bawah kapasitas optimalnya (Eliza, Gistituati, Rusdinal, & Fadli, 2024).

Dalam konteks Kota Surabaya, kebijakan Makan Bergizi Gratis belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh sekolah, melainkan masih terbatas pada beberapa satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan. Kondisi ini menciptakan variasi pengalaman penerapan di tingkat sekolah, sekaligus membuka ruang untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kebijakan dijalankan, tantangan apa saja yang dihadapi, serta strategi apa yang digunakan oleh sekolah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi internalnya. SMPN 13 Surabaya menjadi salah satu sekolah yang menarik untuk dikaji karena telah menjalankan kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam situasi keterbatasan tersebut. Pengalaman sekolah ini mencerminkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat sekolah, mulai dari proses koordinasi, pengelolaan sumber daya, hingga respon warga sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kajian terhadap implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dan diterapkan di tingkat sekolah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Babu & Hallam, 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan secara sistematis dan rinci kebijakan pelaksanaan proses, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di tingkat sekolah. Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus dengan fokus pada SMPN 13 Surabaya sebagai lokasi penelitian. Studi kasus dipandang tepat karena setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi sumber daya manusia, budaya sekolah, maupun dukungan lingkungan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data naratif dan deskriptif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, koordinator program, guru, staf, dan siswa, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di tingkat sekolah.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik

2.1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya berjalan relatif efektif dan menjadi faktor penting dalam mendukung lancarnya kebijakan

pelaksanaan. Kejelasan kebijakan pesan tercermin dari pola komunikasi vertikal yang langsung antara pemerintah pusat dan sekolah, sehingga sekolah memperoleh informasi yang lengkap, konsisten, dan operasional terkait tujuan, mekanisme, serta ketentuan program teknis. Kejelasan tersebut diperkuat melalui media komunikasi resmi, seperti grup WhatsApp, yang memungkinkan penyampaian informasi secara cepat sekaligus membuka ruang klarifikasi dan umpan balik. Dari sisi transmisi, kebijakan pesan tidak berhenti pada tahap informasi, tetapi diturunkan secara berjenjang melalui kepala sekolah, program koordinator, dan guru, serta diterjemahkan ke dalam bentuk konkret melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan transmisi berlangsung secara sistematis, interaktif, dan berkelanjutan, termasuk dalam pelaporan kendala dan evaluasi program yang dilakukan secara fleksibel dan responsif. Sementara itu, konsistensi komunikasi terlihat dari keseragaman pesan yang disampaikan kepada siswa dan pelaksana internal sekolah melalui peran sentral guru, sehingga meminimalkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan program (Igirisa, 2022).

Meskipun demikian, konsistensi komunikasi kepada orang tua masih perlu diperkuat melalui strategi yang lebih terjadwal dan langsung agar pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya bergantung pada perantara. Secara keseluruhan, komunikasi yang jelas, berjenjang, dan konsistensi relatif di SMPN 13 Surabaya telah menciptakan pemahaman bersama antar pelaksana, memperkuat koordinasi, serta mendorong penerimaan positif terhadap Program Makan Bergizi Gratis, sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menempatkan komunikasi sebagai komponen kunci keberhasilan implementasi (Fatwa & Candra, 2023).

2.2. Sumber daya kebijakan

Sumber daya dalam implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya secara umum berada dalam kondisi mampu dan berfungsi sebagai faktor pendukung keberhasilan kebijakan. Dari aspek sumber daya manusia, kepala sekolah, panitia program, dan guru berperan sebagai aktor kunci yang menjalankan fungsi koordinasi, operasional, dan pengawasan secara jelas dan terstruktur. Pembagian peran yang proporsional, pemahaman tugas yang baik, serta kemampuan pelaksana dalam mengelola beban kerja menunjukkan bahwa SDM tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga berfungsi secara optimal. Keterlibatan aktif guru dalam setiap tahapan pelaksanaan program juga memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat sekolah (Arfiany, 2019).

Dari aspek sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana, SMPN 13 Surabaya telah memiliki fasilitas dasar yang cukup, seperti ruang transit makanan, meja distribusi, dan tempat sampah, yang dimanfaatkan secara adaptif sesuai kondisi sekolah. Penataan fasilitas yang strategis serta keterlibatan guru dalam pengelolaan makanan mendukung kelancaran dan kelancaran pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan pada sarana pendukung teknis, khususnya dalam proses transfer makanan yang masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menambah beban kerja pelaksana. Namun keterbatasan tersebut dapat diatasi melalui pengelolaan yang fleksibel dan kerja sama antar pelaksana. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Kebijakan Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya tidak hanya ditentukan oleh kecukupan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan dukungan sarana

pendukung secara bertahap, implementasi kebijakan dapat berjalan (Albaburrahim, Purnomo, Putikadyanto, & Nur, 2025).

2.3. Sikap Pelaksana Kebijakan

Sikap dan komitmen pelaksana dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya menunjukkan kecenderungan yang sangat positif dan berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Pelaksana kebijakan, yang meliputi pimpinan sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, menunjukkan penerimaan yang tinggi, rasa tanggung jawab, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan program karena meyakini manfaat sosial dan pendidikan yang dihasilkan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sikap positif tersebut tercermin dari partisipasi aktif pelaksana dalam memberikan masukan, menyesuaikan teknis pelaksanaan, serta menjaga kelancaran program agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan prosedur Program Makan Bergizi Gratis juga tergolong baik. Pelaksana tidak hanya memahami program sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebijakan strategis untuk mendukung penyediaan gizi dan kualitas pembelajaran siswa. Pemahaman ini memungkinkan pelaksana menjalankan program secara konsisten sekaligus adaptif, misalnya melalui penyesuaian jadwal distribusi tanpa menyimpang dari ketentuan kebijakan. Selain itu, pemahaman yang mampu turut mendorong program integrasi dengan nilai-nilai edukatif, seperti pembiasaan hidup sehat dan pemahaman gizi seimbang di lingkungan sekolah (Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Putri, 2025).

Dari aspek kemampuan membangun kerja sama, implementasi kebijakan di SMPN 13 Surabaya ditopang oleh kolaborasi yang solid antar pelaksana internal sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, hingga panitia MBG. Pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang lancar menciptakan koordinasi yang efektif di setiap tahapan pelaksanaan program. Kerja sama ini tidak hanya terjadi di antara pelaksana formal, tetapi juga melibatkan siswa dan orang tua melalui pendekatan edukatif dan komunikasi terbuka, terutama ketika program menghadapi kendala sementara. Kesamaan pemahaman terhadap tujuan kebijakan menjadi fondasi utama terbentuknya kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya sangat dipengaruhi oleh disposisi pelaksana yang positif, pemahaman kebijakan yang baik, serta kemampuan membangun kerja sama lintas aktor. Aspek ketiga tersebut saling memperkuat dan menjadi modal penting dalam menjaga kemiskinan serta efektivitas penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan penyediaan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan (Prastiwi, 2025).

2.4. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan masyarakat sekitar sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung terselenggaranya Program Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya. Orang tua siswa memberikan dukungan yang kuat karena merasakan manfaat langsung dari program ini, baik dalam menyediakan kebutuhan gizi anak maupun dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan penyelenggara program tercermin dari sikap kooperatif orang tua, termasuk pada saat program sempat dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi. Pada kondisi tersebut, respon masyarakat tidak menunjukkan penolakan, melainkan didominasi oleh harapan agar program dapat segera dilanjutkan, yang menandakan bahwa program ini telah dianggap sebagai kebutuhan penting bagi siswa. Dukungan lingkungan sekitar sekolah juga ikut memperkuat

stabilitas pelaksanaan kebijakan. Pedagang kantin sekolah pada awalnya sempat mengirimkan dampak program terhadap aktivitas ekonomi mereka, namun melalui komunikasi yang terbuka dan penyesuaian mekanisme pelaksanaan, potensi konflik tersebut dapat dihindari. Aktivitas kantin tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan makan bergizi gratis tidak menimbulkan gangguan sosial maupun ekonomi di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan lokal menjadi faktor penting dalam menjaga penerimaan dan kemiskinan kebijakan di tingkat sekolah (Indahri, Kartika, Arifa, Sholikhah, & Suni, 2024).

Dari sisi kondisi sosial sekolah, Program Makan Bergizi Gratis berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kondusif. Seluruh siswa menerima perlakuan yang sama tanpa pembedaan latar belakang ekonomi, sehingga mengurangi potensi stigma sosial dan memperkuat rasa kebersamaan antar siswa. Interaksi sosial di lingkungan sekolah menjadi lebih positif, ditandai dengan meningkatnya solidaritas, kebiasaan berbagi, serta hubungan yang lebih erat antara guru dan siswa. Keterlibatan guru tidak hanya terbatas pada pendistribusian makanan, tetapi juga pada memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga program ini memiliki nilai edukatif yang selaras dengan tujuan pendidikan. Selain itu, penerapan Program Makan Bergizi Gratis juga mempengaruhi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjadi lebih hemat dalam penggunaan uang jajan karena kebutuhan makan telah terpenuhi di sekolah, namun tetap mempertahankan fungsi sosial kantin sebagai ruang interaksi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai program penyediaan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk perilaku sosial yang positif dan mendorong terciptanya suasana sekolah yang sehat dan harmonis (Mebra & Mauleny, 2025).

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 13 Surabaya menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi secara umum telah mendukung pelaksanaan program. Kebijakan MBG disampaikan secara langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah, sehingga pelaksana memperoleh kejelasan tujuan dan mekanisme program. Kebijakan transmisi berjalan berjenjang dan diperkuat dengan SK, SOP, serta komunikasi dua arah melalui media digital, meskipun konsistensi penyampaian informasi kepada orang tua masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia dan sarana infrastruktur pada dasarnya telah mampu, dengan pembagian tugas yang jelas dan keterlibatan aktif pelaksana tanpa mengganggu proses pembelajaran. Pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi terhadap program, didukung oleh pemahaman yang baik atas tujuan kebijakan serta antusiasme siswa sebagai penerima manfaat. Selain itu, lingkungan sosial dan ekonomi sekolah bersifat kondusif, diwujudkan oleh dukungan orang tua, penerimaan lingkungan sekitar, serta manfaat ekonomi yang dirasakan keluarga siswa. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut berperan sebagai pendukung utama keberhasilan implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di SMPN 13 Surabaya.

REFERENSI

- Albaburrahim, Purnomo, A., Putikadyanto, A., & Nur, A. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis : Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045*.
- Arfiany. (2019). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. Tiga Saudara Indonusa Makassar. *SIMAK*, 1(1), 1–10.
- Babu, S. C., & Hallam, J. A. (2024). Socioeconomic impacts of school feeding programmes. Empirical evidence from a South Indian village. *Food Policy*, 14(1), 58–66. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(89\)90026-2](https://doi.org/10.1016/0306-9192(89)90026-2)

- Darlan, S., & Wahidin. (2024). *Dasar-Dasar Pendidikan Masyarakat* (S. A. Ajrina Putri Hawari, ed.). Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Eliza, F., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Fadli, R. (2024). Analisis SWOT Kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah Menengah Kejuruan. *Juwara Jurnal Wawasan Dan Aksara*, 4(1), 121–129. <https://doi.org/10.58740/juwara.v4i1.91>
- Fatwa, A., & Candra, M. (2023). Penerapan Hybrid Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 di SD Anugrah Surabaya. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 03(05), 22–30.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik* (1st ed.; I. Muhammad, ed.). Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Indahri, Y., Kartika, S. D., Arifa, F. N., Sholikhah, N., & Suni, P. (2024). *Pembelajaran Kebijakan Internasional untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah*.
- Mebra, Y. A., & Mauleny, A. T. (2025). *Percepatan program makan bergizi gratis: tantangan pendanaan dan implementasi*.
- Palupi, I. R., Rachmawati, V. N., & Prawiningdyah, Y. (2020). Pemenuhan Gizi dari Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah dan Konsentrasi Siswa Sekolah Dasar. *HIGEIA Journal of Public Health Reseacrch and Development*, 4(4).
- Prastiwi, D. (2025). Pedagang Kantin di Sekolah Khawatir soal Adanya Program Makan Bergizi Gratis: Jadi Sepi. *Tim News*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/5879319/pedagang-kantin-di-sekolah-khawatir-soal-adanya-program-makan-bergizi-gratis-jadi-sepi>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Putri, E. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar indonesia Tahun 2025*. 2(2), 2855–2866.
- Rezkiyanti, F. (2021). *Status gizi anak*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cb7nu>
- UNESCO. (2021). *Education for health and well-being: A framework for action*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 1–27. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>